

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Miriam Budiarjo, (2008) *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,
- B.Sutopo, (2002).*Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya Dalam Penelitian*. Surakarta : Sebelas Maret University Press.
- I Wiidarta, 2001. *Cara Mudah Memahami Otonomi Daerah*. Yogyakarta. Lapera Pustaka Utama.
- Muhammad Fauzan, (2006). *Hukum Pemerintahan Daerah; Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah*. Yogyakarta : UII Press.
- Buku saku DPRD, *Membina Hubungan dengan Konstituen*. Local Government Support Program (LGSP) USAID.
- Jamal Wiwoho, (2006).*Lembaga-lembaga Negara Pasca Amandemen Keempat UUD 1945*. Surakarta: UNS Press.
- Peter Mahmud Marzuki, (2011),*Penulisan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Jean Jacques Rousseau, (2009). *Du Contract Social (Perjanjian Sosia)*. Jakarta: Visimedia
- Wasistiono, (2009).*Meningkatkan Kinerja DPRD*, Bandung : Fokusmedia
- Syaukani, (2003).*Otonomi Daerah dan Kompetensi Lokal*. Jakarta : Milienium Publisher.
- Siswanto Suwarno, (2012). *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: SinarGrafika.

Lexy J. Moleong, (2009) *Metedologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung:

Remaja Rosdakarya

Jimly Asshiddiqie, (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Sekertariat

Soerjono Soekanto, (1986). *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru Kedua. Jakarta:

Radjawali_____, (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Zuhri, (2012). *Buku Panduan Reses*. Pangkal Pinang.

JURNAL

Abd Hafidh, (2014). *Hubungan Anggota Legislatif Kota Makasar Dengan Masyarakat Pendukungnya*. Vol 3.No2.165-174.

H Hidayatullah , (2015). *Analisis Jaring Aspirasi Melaui Reses Dewan Perwakilan Rakyat daerah Lombok Timur*. Vol. 3 No. 2 Juni 2016

Wahid Abdulrahman, (2014). *Desain Ulang Reses DPRD*. Semarang: Fakultas Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro.

Eko Priyo Utomo d.k.k (2013). *Strategi Komunikasi Dalam Menyerap Aspirasi Mayarakat Adat Oleh Anggota DPRD Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat*. Vol 2. No 4. Jurnal Kareba.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

INTERNET

(<http://edisicetak.joglosemar.co/berita/reses-dewan-telan-rp-2475-juta-84494.html> diakses pada senin, 3 oktober 2016 pukul 18.30WIB).

(<http://makassar.tribunnews.com/2014/11/17/reses-legislator-dan-manfaatnya> diakses pada selasa, 4 Oktober 2016 pukul 20.30WIB).

IDENTITAS INFORMAN

1. Nama : Bapak Nurjayanto, S.P
Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten
Sukoharjo Periode 2014-2019
2. Nama : Bapak Giyarto, S.H, M.H
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Kabupaten Sukoharjo Periode 2014-2019
3. Nama : Bapak Eko Sapto, S.E
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Kabupaten Sukoharjo Periode 2014-2019
4. Nama : Bapak Sunoto, S.H
Jabatan: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten
Sukoharjo Periode 2014-2019

PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman Wawancara Untuk Anggota-Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo

1. Bagaimana pelaksanaan tugas penyerapan aspirasi masyarakat oleh anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo?
2. Apa saja bentuk pelaksanaan penyerapan aspirasi yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo?
3. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan penyerapan aspirasi anda?
4. Apa saja aspirasi yang disampaikan konstituen di daerah pemilihan anda?
5. Apa kendala yang dihadapi oleh anggota DPRD saat melakukan kegiatan penyerapan aspirasi?
6. Bagaimana solusi anggota DPRD terkait kendala dalam kegiatan penyerapan aspirasi?